

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Latar belakang yang menyebabkan terjadinya konflik di Xinjiang ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor geografis, Xinjiang memiliki letak yang strategis secara geopolitik, dengan melimpahnya sumber daya alam, pertambangan gas dan minyak bumi, Xinjiang mampu menarik perhatian pemerintah Tiongkok. Melalui aset Xinjiang yang tak ternilai harganya ini yang mendorong pemerintah Tiongkok untuk mengambil alih wilayah Xinjiang sebagai bagian dari wilayah otonominya, Pemerintah Tiongkok menyadari adanya potensi-potensi ekonomi yang berdampak bagi kehidupan perekonomiannya. Setelah Xinjiang masuk kedalam otonomi Tiongkok, walaupun dinyatakan otonomi namun implementasi nyata dari status otonomi ini nampaknya belum benar-benar otonom. Maksudnya adalah, ada gap yang sangat besar antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi di daerah dengan status otonom yang dimiliki.

Hal ini menyebabkan etnik Uighur seolah-olah memiliki kekurangan kontrol politik bahkan diskriminasi ekonomi terjadi dan mengakibatkan kesenjangan dikalangan etnis Uighur sendiri. Sehingga dari hal ini dapat menjadi pemicu terjadi konflik antara pemerintah Tiongkok dengan etnis Uighur sebagai penduduk asli Xinjiang. Selain dari aspek Geografi dan sumber daya alam, dari segi kultural etnis Uighur yang merasa lebih dekat dengan bangsa Turki di Asia Tengah, daripada mayoritas bangsa Han. Etnis Uighur memiliki banyak perbedaan ras dengan orang China-han. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dari aspek bahasa, kultur, ideologi dan morfologi fisik dengan mayoritas penduduk Tiongkok pada umumnya. jika dilihat dari sejarahnya Uighur ini merupakan keturunan Turki dan memiliki catatan sejarah yang cukup panjang dalam perjalanannya sebagai bangsa China. Melalui perbedaan inilah kesadaran etnis Uighur terbangun bahwa mereka bukanlah orang China. Dan dari perbedaan tersebut telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkembangnya Konflik di Xinjiang. Etnis Uighur yang terpinggirkan akhirnya memilih untuk menuntut hak merdeka dan melancarkan aksi separatisme dan hal ini semakin memperpanjang keberlangsungan konflik ini.

Adapun kebijakan – kebijakan utama yang menjadi pemicu terjadinya konflik diantaranya adalah, Kebijakan Nasionalisme Transmigrasi etnis Han, kebijakan *Strike Hard*, pembatasan ekspresi kebudayaan, kebijakan dalam bidang pendidikan penghapusan tulisan Arab dan pendidikan bahasa Mandarin, serta kebijakan ekonomi dan otonomi terbatas di Xinjiang. Namun diantara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada satu kebijakan yang menjadi akar pemicu terjadinya konflik di Xinjiang, kebijakan tersebut adalah, Kebijakan Transmigrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang dengan tujuan menasionalisasi daerah tersebut. Esensi dari kebijakan ini adalah pemerintah Tiongkok mentransfer sejumlah penduduk etnik Han ke daerah Xinjiang dengan tujuan asimilasi kultural. Migrasi penduduk etnik Han ke Xinjiang ini tentu saja dapat merubah demografi di Xinjiang itu sendiri. Dari transmigrasi ini memiliki dampak yang begitu besar bagi etnis Uighur. tentu saja ini menimbulkan perasaan di mana etnik Uighur tersebut seolah-olah menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Perubahan secara demografis di wilayah Xinjiang ini kemudian memiliki beberapa implikasi yang secara umum berarti deprivasi yang dirasakan oleh etnik Uighur. Deprivasi itu diantaranya, adanya deprivasi kendala bahasa. Keberadaan etnik Han yang semakin signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas tersebut lebih jauh lagi mengaksentuasi kompleksitas dalam sistem pendidikan yang diinstitusionalisasikan di Xinjiang, Deprivasi yang kedua adalah deprivasi secara ekonomi, deprivasi yang ketiga adalah deprivasi di bidang politik, dan deprivasi yang keempat adalah deprivasi di bidang agama. Dengan demikian deprivasi-deprivasi ini membuat masyarakat Uighur kecewa dan merasa terdiskriminasi karena harus terjajah di tanah mereka sendiri dan tenggelam di antara orang-orang Han yang tergolong pendatang.

Kebijakan pemerintah Tiongkok yang dirasa membuat etnis Uighur merasa tidak nyaman dan adanya diskriminasi di dalamnya membuat mereka semakin membenci pemerintahan bahkan tidak sedikit sering terjadi respon atas kebijakan tersebut dari etnis Uighur. Awal mula upaya yang dilakukan oleh etnis

Uighur hanya sebatas demonstrasi- demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang dirasa menyempitkan kebebasan mereka. Banyak sekali pergolakan serta usaha- usaha pemberontakan yang muncul akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustrasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi pemerintah China. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah China ini mengancam Uighur baik dalam hal *mortal threats* (ancaman terkait keamanan dan rasa aman) maupun *cultural threat* (ancaman terkait kultur atau identitas etnik Uighur tersebut). Penulis melihat fakta bahwa hampir seluruh etnik Uighur beragama Islam kemudian digunakan pemerintah untuk melakukan kebijakan represif *Strike Hard* atau *gebuk keras* berupa dikekannya hak-hak masyarakat Uighur untuk menjalankan agamanya secara total. Upaya yang dilakukan oleh Etnis Uighur awal mula dituangkan lewat sebuah organisasi nasionalisnya yaitu di kenal dengan nama WUC (*world Uighur Youth Congress*) organisasi ini merupakan muara dari perjuangan gerakan-gerakan nasionalis Uighur namun WUC ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk berhadapan langsung dengan pemerintah Tiongkok. Upaya lain yang dilakukan semula hanya demonstrasi biasa hingga akhirnya etnis Uighur melakukan serangan dengan menggunakan senjata dan bahan peledak hingga puncaknya Uighur melakukan serangan pisau pada tahun 2014.

Akibat atau dampak dari adanya konflik ini mengakibatkan hubungan antara etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok semakin renggang. Keadaan tersebut menimbulkan ketegangan rasialis. Sampai saat ini pun pemerintah Tiongkok menyederhanakan peristiwa berdarah tersebut sebagai konflik etnis antara etnis Uighur dan etnis Han, Tiongkok tetap melangsungkan kebijakannya dengan alasan untuk keamanan negaranya dan memerangi ancaman dari gerakan separatis Uighur.

5.2. Rekomendasi

Bagi lembaga pendidikan SMA atau sederajat, penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber referensi maupun bacaan terutama bagi kelas XII IPS

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS
TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sejarah peminatan dalam kurikulum 2013 dapat menunjang KD 3.1 mengevaluasi perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Pembahasan mengenai konflik yang terjadi di Asia pasca Perang Dingin.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam meneliti perkembangan kehidupan umat muslim di Tiongkok. Penulis menyadari bahwa penelitian tentang umat muslim di Tiongkok khususnya etnis Uighur di Xinjiang ini, belum banyak diketahui dan belum terlalu banyak yang melakukan penelitian maka dari itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, sebenarnya masih banyak pula hal hal yang belum tuntas dibahas dalam penelitian seperti bagaimana sikap dunia internasional dalam menyikapi masalah konflik Uighur ini kemudian respon dari umat muslim Uighur mengenai organisasi- organisasi yang aktif dalam perlawanan belum peneliti kaji secara mendalam dan kehidupannya hingga saat ini masih belum dikupas habis.

Bagi Departemen Pendidikan sejarah, penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa pendidikan sejarah terutama dalam mata kuliah sejarah peradaban Timur dan Sejarah kebangkitan negara- negara Asia.